SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 112 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pegendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk peride 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil *(outcome)* suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II
RENJA PD

Pasal 2

Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Pasal 3

Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat;

a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
e. Penutup; dan
f. lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Renja PD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renstra PD Tahun 2021-2026 yang akan digunakan PD untuk melaksanakan Rencana Kerja PD;

(2) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:
   a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan rencana kerja PD tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan PD;
   b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD;
   c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran PD yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya; dan
   d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Pasal 5

(1) Renja PD digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RKA PD.

(2) Renja PD selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung yang mengatur mengenai Renstra PD Tahun 2021-2026.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja PD menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja PD meliputi;

a. Semua ketetapan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD;
b. Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD;
c. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD; dan

d. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan Renja PD.

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja PD.
(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Laporan relaisasi kinerja dan anggaran Renja PD disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektonik.
(5) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi kendala atau permasalahan teknis maka dapat disampaikan secara manual.
(6) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun berikutnya dan/ atau perubahan Renja PD tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD dan evaluasi hasil Renja PD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitan dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan PD terhadap pelaksanaan dan hasil Renja PD.

(3) Kepala PD menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja PD.

(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.

(5) Pengendalian pelaksanaan Renja PD dilakukan pada saat penyusunan RKA PD.

BAB V
PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 10

(1) Renja PD dapat diubah apabila :
   a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.
   b. terdapat keridaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam pasal 9; dan
   c. dalam hal terjadinya penyesuaian tujuan dan sasaran PD beserta target indikatornya, sebagaimana tertuang didalam Renstra PD Tahun 2021-2026.

(2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari :
   a. pagu anggaran program;
   b. kegiatan dan sub kegiatan;
   c. perubahan target indikator kinerja program; dan
   d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja PD tahun 2025.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2024

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 112

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001



PERATURAN BUPATI BANDUNG

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN (DISKOMINFO)

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

diskominfo Kabupaten Bandung

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat-Nya Kami dapat menyelesaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (DISKOMINFO) Kabupaten Bandung. Dokumen ini dibuat sebagai awal perencanaan pembangunan pada Diskominfo untuk Tahun Anggaran 2025.

Ranhir Renja ini merupakan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Selain itu, Ranhir Renja DISKOMINFO ini juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025. Rancangan 2025 ini dibuat dengan memperhatikan dinamika regulasi dan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan secara bertingkat dari nasional, provinsi sampai dengan pemerintahan level Kabupaten.

Kami menyadari bahwa Ranhir Renja Tahun 2025 ini masih banyak kekurangan, serta dokumen ini memungkinkan untuk dilakukan perubahan jika terdapat perubahan dan koreksi melalui mekanisme yang sesuai dengan regulasi. Selain itu, Ranhir Renja Tahunan ini dapat diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai rencana program kegiatan Diskominfo Tahun Anggaran 2025.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua Aamiin.

Soreang, 17 Juli 2024

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANDUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DISKOMINFO

H. YOSEP NUGRAHA, SH., M.I.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730628 199202 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I P E N D A H U L U A N 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN LALU 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Tahun Lalu dan Capaian Renstra Pemerintah Daerah 6
2.1.1 Evaluasi Capaian Renja Tahun Berjalan dan Renstra 13
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 28
2.3 *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD 29
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 43
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 44
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat 44
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 60
3.3 Program dan Kegiatan 61
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 75
BAB V P E N U T U P 83

DAFTAR TABEL

2.1 Evaluasi Hasil Renja PD 13
2.2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dan Analisis Kebutuhan Tahun 2025 30
2.3 Usulan Program & Kegiatan 43
3.1 Rumusan Visi, Misi dan Tujuan BPS 2020-2025 51
3.2 Program dan Kegiatan Diskominfo Tahun Anggaran..... 62
4.1 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Diskominfo Tahun 75

DAFTAR GAMBAR

3.1 Penjabaran Visi Misi Presiden 45
3.2 Kerangka Renstra Kemenkominfo 2020-2025..... 47
3.3 Visi dan Misi Kabupaten Bandung 2021-2026 61

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) ini dibuat dengan memperhitungkan hasil evaluasi pada capaian tahun sebelumnya, sehingga program dan kegiatan yang tertuang pada Ranhir Renja Diskominfo tahun 2025 ini merupakan kegiatan lanjutan pada tahun sebelumnya. Dokumen Ranhir RenjaTahun 2025 ini merupakan dokumen penting yang dijadikan sebagai bahan dasar monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan karena memuat indikator kinerja pada tahun 2025. Selain itu, dimuat juga pagu anggaran yang merupakan target capaian pada proses pelaksanaan program dan kegiatan.

Ranhir Renja Diskominfo Kabupaten Bandung ini merupakan dokumen strategis yang mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Ranhir Renja SKPD merupakan dokumen turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Ranhir Renja merupakan acuan Perangkat Daerah penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025;
3. Ranhir Renja Diskominfo ini merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Ada beberapa hal yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung di Tahun 2025 ini, melalui keberadaan Diskominfo, diantaranya meningkatkan eksistensi dari urusan kewenangan Komunikasi Informatika, urusan kewenangan Statistik, serta urusan kewenangan Persandian. Diharapkan, Diskominfo dapat menjadi suatu lembaga yang dapat diandalkan dalam penyediaan informasi, penyediaan sarana komunikasi informatika yang berkualitas, penyedia data statistik yang berkualitas dengan sistem keamanan informasi yang handal.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan RanhirRenja Diskominfo Tahun 2025 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

10. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
15. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
16. Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kab. Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bandung Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bandung;

23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 147 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2022 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung;
26. Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026.
27. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 92).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Ranhir Renja DISKOMINFO Kabupaten Bandung adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk satu periode Tahun Anggaran, dalam menyusun rencana program/kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi DISKOMINFO Kabupaten Bandung. Sedangkan Tujuan penyusunan Ranhir Renja DISKOMINFO Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah:

a. Menjadi pedoman bagi DISKOMINFO Kabupaten Bandung dalam melaksanakan seluruh kegiatan pada Tahun Anggaran 2025;
b. Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program pelayanan publik;
c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik;
d. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur DISKOMINFO Kabupaten Bandung dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Ranhir Renja Diskominfo Kabupaten Bandung Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra DISKOMINFO Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DISKOMINFO Kabupaten Bandung
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DISKOMINFO Kabupaten Bandung
2.4. *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DISKOMINFO Kabupaten Bandung
3.3. Program dan Kegiatan DISKOMINFO Kabupaten Bandung
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB V P E N U T U P

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Tahun Lalu dan Capaian Renstra Pemerintah Daerah

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Ada beberapa perubahan nomenklatur Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian pada tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut:

- **Program dan Kegiatan 2023**

A. Urusan Komunikasi dan Informatika

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Mebel

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik
- Layanan Hubungan Media

- Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
- Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

B. Urusan Statistik:

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

- Membangun Metadata Statistik Sektoral
- Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

C. Urusan Persandian:

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- **Program dan Kegiatan 2024**

A. Urusan Komunikasi dan Informatika

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Mebel

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik
- Layanan Hubungan Media
- Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- Penyelenggaraan Sistem Komunikasi IntraPemerintah Daerah
- Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

- Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

B. Urusan Statistik:

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

a. **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- Membangun Metadata Statistik Sektoral
- Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

C. Urusan Persandian:

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

b. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1 Evaluasi Capaian Renja Tahun Berjalan dan Renstra

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2023 sangat penting dibuat sebagai kontrol pada pelaksanaan kegiatan dokumen 5 tahunan dan 1 tahunan. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang sudah sejalan dengan dokumen yang dibuat. Uraian perbandingan target dan realisasi dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja PD Tahun 2023 dan Renstra

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-3)	Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	K	Target K	Realisasi K	(K %)	K	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**365,5 Point**	**72,71 Point**	**73 Point**	**76,31 Point**	**105%**	**73,5 Point**	**222,52 Point**	**61%**
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang diselesaikan tepat waktu**	**500 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**	**100 Persen**	**300 Persen**	**60%**
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	7 dokumen	70%
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	0 dokumen	3 dokumen	60%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-3)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
												Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K		K		Target K	Realisasi K	(K %)	K		K		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	8=(7/6)	(9)		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dokumen	2	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	0	dokumen	3	dokumen	60%
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	dokumen	0	dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0	dokumen	0	dokumen	0%
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	dokumen	0	dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0	dokumen	0	dokumen	0%
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13	Laporan	4	Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	0	Laporan	4	Laporan	31%
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Diskominfo	4	Laporan	0	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1	Laporan	2	Laporan	50%
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan**	**500**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**	**100**	**Persen**	**300**	**Persen**	**60%**
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	205	Orang/bulan	57	Orang/bulan	57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	100%	57	Orang/bulan	171	Orang/bulan	83%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-3)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K		K		Target K		Realisasi K		(K %)		K		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		8=(7/6)		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Diskominfo	48	Dokumen	0	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12 Dokumen	24	Dokumen	50%
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	0 Laporan	2	Laporan	50%
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Diskominfo dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesterean Diskominfo	36	Laporan	0	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	0 Laporan	12	Laporan	33%
2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu**	**500**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100%**	**100 Persen**	**300**	**Persen**	**60%**
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	Paket		Paket	2	Paket	2	Paket	100%	1 Paket	3	Paket	75%
2.16.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100%	0 Dokumen	8	Dokumen	50%
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3	Orang	1	Orang	0	Orang	0	Orang	#DIV/0!	0 Orang	1	Orang	33%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-3)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K		K		Target K		Realisasi K		(K %)		K		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		8=(7/6)		(9)		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	213	Orang	53	Orang	0	Orang	0	Orang	#DIV/0!	53	Orang	106	Orang	50%
2.16.01.2.06	**Administrasi UmumPerangkat Daerah**	**Tersedianya Persentase ketersediaan operasional perkantoran**	**500**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100%**	**100**	**Persen**	**300**	**Persen**	**60%**
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	3	Paket	60%
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	Paket	3	Paket	2	Paket	2	Paket	100%	3	Paket	8	Paket	53%
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	0	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	2	Paket	50%
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	3	Paket	60%
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	paket	1	paket	1	paket	1	paket	100%	1	paket	3	paket	60%
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Disediakan	10	dokumen	0	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2	dokumen	4	dokumen	40%
2.16.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket		Paket		Paket		Paket	0%		Paket	0	Paket	0%
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	Laporan	20	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	20	Laporan	52	Laporan	52%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-3)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K		K		Target K		Realisasi K		(K %)		K		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		8=(7/6)		(9)		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Laporan	30	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	30	Laporan	72	Laporan	48%
2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah**	**Tersedianya Persentase ketersediaan operasional perkantoran**	**500**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100%**	**100**	**Persen**	**300**	**Persen**	**60%**
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit	0	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	2	Unit	50%
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Persentase ketersediaan operasional perkantoran**	**500**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100%**	**100**	**Persen**	**300**	**Persen**	**60%**
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3	Laporan	60%
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15	Laporan	3	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100%	3	Laporan	8	Laporan	53%
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50	Laporan	10	Laporan	17	Laporan	17	Laporan	100%	10	Laporan	37	Laporan	74%
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Persentase ketersediaan operasional perkantoran**	**500**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100%**	**100**	**Persen**	**300**	**Persen**	**60%**
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	90	Unit	27	Unit	18	Unit	18	Unit	100%	0	Unit	45	Unit	50%
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	20	Unit	4	Unit	4	Unit	4	Unit	100%	4	Unit	12	Unit	60%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-3)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
												Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K		K		Target K	Realisasi K	(K %)	K		K		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	8=(7/6)	(9)		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya												
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	Unit	5	Unit	4	4	100%	5	Unit	14	Unit	56%
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	5	Unit	1	Unit	1	1	100%	1	Unit	3	Unit	60%
2.16.02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**500**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**Persen**	**300**	**Persen**	**60%**
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Indeks Presepsi Publik terhadap penyediaan informasi pemerintahan daerah**	**399**	**Point**	**78**	**Point**	**79**	**81,6**	**103%**	**80**	**Point**	**239,6**	**Point**	**60%**
2.16.02.2.01.01	Perunusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	5	Dokumen	1	Dokumen	1	1	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	60%
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	5	Dokumen	1	Dokumen	1	1	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	60%
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	5	Dokumen	2	Dokumen	1	1	100%	1	Dokumen	4	Dokumen	80%
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5	Dokumen	1	Dokumen	1	1	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	60%
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	5	Dokumen	1	Dokumen	1	1	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	60%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-3)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K		K		Target K		Realisasi K		(K %)		K		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		8=(7/6)		(9)		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	5	Layanan	1	Layanan	2	Layanan	2	Layanan	100%	1	Layanan	4	Layanan	80%
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	60%
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi yang Meningkat Kapasitasnya	500	Orang	100	Orang	100	Orang	100	Orang	100%	100	Orang	300	Orang	60%
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan HubunganMasyarakat, Media danKemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	60%
2.16.02.2.01.13	Penyediaaan / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5	Unit	0	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	2	Unit	40%
2.16.02.2.01.14	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	2	Laporan	0	Laporan		Laporan		Laporan			Laporan	0	Laporan	0%
2.16.02.2.01.15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2	Komunitas	0	Komunitas		Komunitas		Komunitas			Komunitas		Komunitas	0%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-3)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K		K		Target K	Realisasi K	(K %)	K	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.02.2.01.17	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	2		-							0%
2.16.02.2.01.19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	2	Rekomendasi	0	Rekomendasi	Rekomendasi	Rekomendasi		Rekomendasi	Rekomendasi	0%
2.16.02.2.01.20	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	1									0%
2.16.02.2.01.21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	10	Media		Media	Media	Media		Media	Media	0%
2.16.02.2.01.22	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	2	Dokumen		Dokumen	Dokumen	Dokumen		Dokumen	Dokumen	0%
2.16.02.2.01.23	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	258	Konten		Konten	Konten	Konten		Konten	Konten	0%
2.16.02.2.01.24	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	130	Orang		Orang	Orang	Orang		Orang	Orang	0%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-3)	Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	K	Target K	Realisasi K	(K %)	K	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	**- Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**	285,94 %	32,81 %	46,88 %	46,88 %	100%	57,81 %	137,5	48%
2.16.03		**- Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Perangkat Daerah yang terhubung dengan Akses Internet**	88,41 %	10,69 %	13,72 %	13,72 %	100%	17 %	41,41	47%
2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perangkat daerah mendapatkan layanan jaringan komunikasi data yang memadai**	500 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	300 Persen	60%
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama DomainPemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	3 Unit	1 Domain	1 Domain	1 Domain	100%	1 Domain	3 Domain	100%
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	150%
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	325 Unit	65 Unit	65 Unit	65 Unit	100%	65 Unit	195 Unit	60%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-3)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
												Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K		K		Target K	Realisasi K	(K %)	K		K		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	8=(7/6)	(9)		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2.16.03.2.01.04	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	2	Dokumen		Dokumen		Dokumen			Dokumen		Dokumen	0%
2.16.03.2.02	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Aplikasi penunjang e-government terbangun dan terpelihara**	**38**	**Aplikasi**	**8**	**Aplikasi**	**9**	**9**	**100%**	**9**	**Aplikasi**	**26**	**Aplikasi**	**68%**
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan *E-Government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27	Dokumen	0	Dokumen	4	4	100%	5	Dokumen	9	Dokumen	33%
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	5	Unit	1	Unit	4	4	100%	1	Unit	6	Unit	120%
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	4	Dokumen	0	Dokumen	1	1	100%	1	Dokumen	2	Dokumen	50%
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan SinkronisasiData dan InformasiElektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	325	Perangkat Daerah	65	Perangkat Daerah	65	65	100%	65	Perangkat Daerah	195	Perangkat Daerah	60%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-3)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
												Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K		K		Target K	Realisasi K	(K %)	K		K		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	8=(7/6)	(9)		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	38	Unit	8	Unit	9 Unit	9 Unit	100%	7	Unit	24	Unit	63%
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan *Masterlan Smart City*	12	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3	Dokumen	5	Dokumen	42%
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	5	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1	Dokumen	2	Dokumen	40%
2.16.03.2.02.11	Pengelolaan *Government Chief Information Officer* (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan *Government Chief Information Officer* (GCIO)	8	Dokumen		Dokumen	Dokumen	Dokumen		2	Dokumen	2	Dokumen	25%
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	5	Dokumen	1	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	60%
2.16.03.2.02.13	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	4	Aplikasi		Aplikasi	Aplikasi	Aplikasi			Aplikasi	0	Aplikasi	0%
2.16.03.2.02.14	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	2	Dokumen		Dokumen	Dokumen	Dokumen			Dokumen	0	Dokumen	0%
2.16.03.2.02.15	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	4	Laporan		Laporan	Laporan	Laporan			Laporan	0	Laporan	0%
2.16.03.2.02.18	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur	2	Dokumen		Dokumen	Dokumen	Dokumen			Dokumen	0	Dokumen	0%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-3)	Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	K	Target K	Realisasi K	(K %)	K	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	rencana SPBE Pemerintah Daerah	dan peta rencana yang diusulkan								
2.16.03.2.02.20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	12 Aplikasi	Aplikasi	Aplikasi	Aplikasi		Aplikasi	0 Aplikasi	0%
2.16.03.2.02.21	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Aplikasi	Aplikasi	Aplikasi	Aplikasi		Aplikasi	0 Aplikasi	0%
2.16.03.2.02.23	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	65 unit	unit	unit	unit		unit	0 unit	0%
2.16.03.2.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	31 Perangkat	Perangkat	Perangkat	Perangkat		Perangkat	0 Perangkat	0%
2.16.03.2.02.25	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	4 Layanan	Layanan	Layanan	Layanan		Layanan	0 Layanan	0%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-3)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
												Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K		K		Target K	Realisasi K	(K %)	K		K		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	8=(7/6)	(9)		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2.16.03.2.02.26	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	2	Dokumen		Dokumen		Dokumen			Dokumen	0	Dokumen	0%
2.16.03.2.02.27	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	2	Program		Program		Program			Program	0	Program	0%
2.16.03.2.02.29	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	2	Aplikasi		Aplikasi		Aplikasi			Aplikasi	0	Aplikasi	0%
2.16.03.2.02.30	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	65	Perangkat Daerah		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah			Perangkat Daerah	0	Perangkat Daerah	0%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											0		
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase ketersediaan data statistik yang memenuhi Kaedah Satu Data**	**100**	**Persen**	**27**	**Persen**	**46**	**Persen**	**46**	**Persen**	**100%**	**64**	**Persen**	**137**	**Persen**	**43%**
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi kaidah standar data danmetadata**	**12.944**	**Data**	**3548**	**Data**	**5.897**	**Data**	**5.897**	**Data**	**100%**	**8.246**	**Data**	**17691**	**Data**	**43%**
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	10	dokumen	3	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2	dokumen	7	dokumen	70%
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	60%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-3)	Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	K	Target K	Realisasi K	(K %)	K	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
2.20.02.2.01.07	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan dibidang statistik	260 Orang	Orang	Orang	Orang		Orang	0 Orang	0%
2.20.02.2.01.08	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100						0	0%
2.20.02.2.01.09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100						0	0%
2.20.02.2.01.10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	4 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0%
2.20.02.2.01.11	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	2 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								0	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Tingkat keamanan informasi pemerintah**	**51,63 Persen**	**45,581 Persen**	**46,98 Persen**	**51,62 Persen**	**110%**	**48,53 Persen**	**145,731**	**60%**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-3)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
												Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K		K		Target K	Realisasi K	(K %)	K		K		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	8=(7/6)	(9)		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan persandian**	**500**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**100%**	**100**	**Persen**	**300**	**Persen**	**60%**
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	7	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	5	Dokumen	71%
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7	Orang	7	Orang	0	Orang	0	Orang				7		100%
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3	Laporan	60%
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	325	Perangkat Daerah	65	Perangkat Daerah	65	Perangkat Daerah	65	Perangkat Daerah	100%	65	Perangkat Daerah	195	Perangkat Daerah	60%

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

DISKOMINFO Kabupaten Bandung mengemban amanah sebagai pelaksana 3 urusan diantaranya urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian. Dimana dalam setiap urusan tersebut memiliki permasalahan/isu strategis yang utama dan prioritas diantaranya adalah :

1. Kelembagaan
   a. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
   b. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, sebagai regulasi atau Dasar Hukum untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bandung.
   c. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

   Berdasarkan jumlah pegawai ASN DISKOMINFO Kabupaten Bandung yaitu 46 orang. Dimana berdasarkan peta jabatan DISKOMINFO dari jumlah SDM yang ada tersebut belum memenuhi jumlah yang dibutuhkan, khususnya SDM yang berbasis kompetensi "IT".

3. Regulasi

   Dalam hal mendukung pencapaian target kinerja DISKOMINFO Kabupaten Bandung, dari sisi tata kelola peraturan perundang-undangan didaerah belum disusun sesuai dengan kebutuhan yang ada, misalnya Peraturan Daerah terkait Smart City, Keamanan Informasi, implementasi TIK, pengelolaan APTIKA dan lain-lain.

4. Akses Infrastruktur Jaringan

Layanan Infrastruktur Jaringan TIK ini merupakan layanan dasar dalam beroperasinya suatu sistem informasi, dimana melalui layanan inilah semua PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dapat saling terkoneksi dan berkontribusi dalam menghasilkan informasi yang berkualitas. Layanan jaringan komunikasi data tersebut akan berjalan dengan baik bilamana dilakukan pemeliharaan secara rutin, yang apabila terganggu maka akan berdampak negatif terhadap kualitas layanan publik dan kinerja aparatur di lingkungan Pemkab Bandung.

2.3 *Review* terhadap Rancangan RKPD

Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan, untuk sebagian besar kegiatan dan sesuai kebutuhan. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan, dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.2

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dan Analisis Kebutuhan Tahun 2025

NO	PAGU RANHIR 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				**30.653.315.420**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**				**35.867.835.420**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**30.653.315.420**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**35.867.835.420**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				**27.796.082.420**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**32.050.967.420**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**DISKOMINFO**	***Nilai AKIP***	**74**	**15.863.785.310**	**16.145.035.310**	**DISKOMINFO**	**16.145.035.310**	**74**	**16.145.035.310**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**DISKOMINFO**	***Tersedianya Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang diselesaikan tepat waktu***	**100%**	**107.099.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**DISKOMINFO**	***Tersedianya Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang diselesaikan tepat waktu***	**100%**	**107.099.000**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISKOMINFO	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	11.319.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISKOMINFO	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	11.319.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DISKOMINFO	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	3.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DISKOMINFO	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	3.250.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DISKOMINFO	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	3.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DISKOMINFO	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	3.250.000	

NO	PAGU RANHIR 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	**LOKASI**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**LOKASI**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DISKOMINFO	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DISKOMINFO	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	4.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DISKOMINFO	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	DISKOMINFO	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	4.000.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DISKOMINFO	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	3 Laporan	6.680.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DISKOMINFO	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	3 Laporan	6.680.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISKOMINFO	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	1 Laporan	2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISKOMINFO	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	1 Laporan	2.000.000	
8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	DISKOMINFO	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah*	1 Dokumen	72.600.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	DISKOMINFO	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah*	1 Dokumen	72.600.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**DISKOMINFO**	***Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan***	**100%**	**12.942.739.420**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**DISKOMINFO**	***Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan***	**100%**	**12.942.739.420**	
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISKOMINFO	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	57 Orang/bulan	12.914.989.420	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISKOMINFO	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	57 Orang/bulan	12.914.989.420	

NO	PAGU RANHIR 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	**LOKASI**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**LOKASI**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DISKO MINFO	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD*	12 Dokumen	6.250.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DISKO MINFO	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD*	12 Dokumen	6.250.000	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DISKO MINFO	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	10.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DISKO MINFO	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	10.750.000	
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DISKO MINFO	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan a n/ Semesteran SKPD*	12 Laporan	10.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DISKO MINFO	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan a n/ Semesteran SKPD*	12 Laporan	10.750.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**DISKO MINFO**	***Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu***	**100%**	**99.900.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**DISKO MINFO**	***Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu***	**100%**	**99.900.000**	
13	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DISKO MINFO	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	1 Paket	20.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DISKO MINFO	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	1 Paket	20.000.000	
14	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DISKO MINFO	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	4 Dokumen	10.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DISKO MINFO	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	4 Dokumen	10.000.000	

NO	PAGU RANHIR 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	**LOKASI**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**LOKASI**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DISKOMINFO	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	1 Orang	11.960.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DISKOMINFO	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	1 Orang	11.960.000	
16	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DISKOMINFO	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	57 Orang	57.940.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DISKOMINFO	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	57 Orang	57.940.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**DISKOMINFO**	***Tersedianya Persentase ketersediaan operasional perkantoran***	**100%**	**179.500.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**DISKOMINFO**	***Tersedianya Persentase ketersediaan operasional perkantoran***	**100%**	**179.500.000**	
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DISKOMINFO	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DISKOMINFO	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	10.000.000	
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISKOMINFO	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	2 Paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISKOMINFO	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	2 Paket	10.000.000	
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DISKOMINFO	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DISKOMINFO	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	10.000.000	
20	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DISKOMINFO	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DISKOMINFO	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	10.000.000	
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DISKOMINFO	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	1 Dokumen	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DISKOMINFO	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	1 Dokumen	10.000.000	

NO	PAGU RANHIR 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	**LOKASI**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**LOKASI**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
22	Penyediaan Bahan/Material	DISKOMINFO	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Bahan/Material	DISKOMINFO	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	1 Paket	10.000.000	
23	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DISKOMINFO	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	19.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DISKOMINFO	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	19.500.000	
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISKOMINFO	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISKOMINFO	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	100.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**DISKOMINFO**	***Tersedianya Persentase ketersediaan operasional perkantoran***	**100%**	**465.331.890**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**DISKOMINFO**	***Tersedianya Persentase ketersediaan operasional perkantoran***	**100%**	**465.331.890**	
25	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISKOMINFO	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	1 Unit	167.931.890	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISKOMINFO	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	1 Unit	167.931.890	
26	Pengadaan Mebel	DISKOMINFO	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	1 Unit	200.000.000	Pengadaan Mebel	DISKOMINFO	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	1 Unit	200.000.000	
27	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISKOMINFO	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	20 Unit	97.400.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISKOMINFO	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	20 Unit	97.400.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**DISKOMINFO**	***Tersedianya Persentase ketersediaan operasional perkantoran***	**100%**	**1.533.098.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**DISKOMINFO**	***Tersedianya Persentase ketersediaan operasional perkantoran***	**100%**	**1.814.348.000**	
28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DISKOMINFO	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	2.560.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DISKOMINFO	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	2.560.000	
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISKOMINFO	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	2 Laporan	530.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISKOMINFO	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	2 Laporan	530.000.000	

NO	PAGU RANHIR 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISKOMINFO	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	10 Laporan	1.000.538.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISKOMINFO	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	10 Laporan	1.281.788.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**DISKOMINFO**	***Tersedianya Persentase ketersediaan operasional perkantoran***	**100%**	**536.117.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**DISKOMINFO**	***Tersedianya Persentase ketersediaan operasional perkantoran***	**100%**	**536.117.000**	
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISKOMINFO	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	32.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISKOMINFO	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	32.000.000	
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISKOMINFO	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	15 Unit	269.109.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISKOMINFO	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	15 Unit	269.109.000	
33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISKOMINFO	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	5 Unit	35.008.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISKOMINFO	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	5 Unit	35.008.000	
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DISKOMINFO	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DISKOMINFO	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	200.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**DISKOMINFO**	**Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**100%**	**3.227.962.818**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**DISKOMINFO**	**Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**100%**	**3.227.962.818**	

NO	PAGU RANHIR 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	**LOKASI**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**LOKASI**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DISKOMINFO	**Indeks Presepsi Publik terhadap penyediaan informasi pemerintahan daerah**	**81**	**3.227.962.818**	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	DISKOMINFO	**Indeks Presepsi Publik terhadap penyediaan informasi pemerintahan daerah**	**81**	**3.227.962.818**	
35	Relasi Media	DISKOMINFO	*Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media*	1 Laporan	149.640.000	Relasi Media	DISKOMINFO	*Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media*	1 Laporan	149.640.000	
36	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	DISKOMINFO	*Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo*	1 Komunitas	37.738.000	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	DISKOMINFO	*Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo*	1 Komunitas	37.738.000	
37	Pelayanan Informasi Publik	DISKOMINFO	*Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan*	2 Permohonan	259.394.000	Pelayanan Informasi Publik	DISKOMINFO	*Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan*	2 Permohonan	259.394.000	
38	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	DISKOMINFO	*Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah*	1 Rekomendasi	66.650.000	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	DISKOMINFO	*Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah*	1 Rekomendasi	66.650.000	

NO	PAGU RANHIR 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	**LOKASI**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**LOKASI**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
39	Diseminasi Informasi	DISKOMINFO	*Persentase khalayak yang terpapar informasi publik*	100 Persentase	1.457.301.318	Diseminasi Informasi	DISKOMINFO	*Persentase khalayak yang terpapar informasi publik*	100 Persentase	1.457.301.318	
40	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	DISKOMINFO	*Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis*	5 Media	518.000.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	DISKOMINFO	*Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis*	5 Media	518.000.000	
41	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	DISKOMINFO	*Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun*	1 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	DISKOMINFO	*Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun*	1 Dokumen	25.000.000	
42	Penyusunan Konten	DISKOMINFO	*Jumlah Konten Informasi Publik*	129 Konten	645.681.500	Penyusunan Konten	DISKOMINFO	*Jumlah Konten Informasi Publik*	129 Konten	645.681.500	
43	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	DISKOMINFO	*Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan*	65 Orang	68.558.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	DISKOMINFO	*Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan*	65 Orang	68.558.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**DISKOMINFO**	- ***Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi*** - ***Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Perangkat Daerah yang terhubung dengan Akses Internet***	**- 68,75** **- 22**	**8.704.334.292**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**DISKOMINFO**	- ***Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi*** - ***Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Perangkat Daerah yang terhubung dengan Akses Internet***	**- 68,75** **- 22**	**12.677.969.292**	

NO	PAGU RANHIR 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	**LOKASI**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**LOKASI**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**DISKOMINFO**	***Persentase perangkat daerah mendapatkan layanan jaringan komunikasi data yang memadai***	**100%**	**194.055.000**	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**DISKOMINFO**	***Persentase perangkat daerah mendapatkan layanan jaringan komunikasi data yang memadai***	**100%**	**267.690.000**	
44	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	DISKOMINFO	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa*	1 Dokumen	194.055.000	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	DISKOMINFO	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa*	1 Dokumen	267.690.000	
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DISKOMINFO	**Aplikasi penunjang e-government terbangun dan terpelihara**	**7 Aplikasi**	**8.510.279.292**	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	DISKOMINFO	**Aplikasi penunjang e-government terbangun dan terpelihara**	**7 Aplikasi**	**12.410.279.292**	
45	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	DISKOMINFO	*Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional*	2 Aplikasi	100.000.000	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	DISKOMINFO	*Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional*	2 Aplikasi	2.200.000.000	
46	Koordinasi penyusunan proses bisnis	DISKOMINFO	*Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo*	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi penyusunan proses bisnis	DISKOMINFO	*Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo*	1 Dokumen	50.000.000	
47	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	DISKOMINFO	*Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda*	2 Laporan	100.000.000	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	DISKOMINFO	*Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda*	2 Laporan	100.000.000	
48	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	DISKOMINFO	*Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan*	1 Dokumen	249.460.000	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	DISKOMINFO	*Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan*	1 Dokumen	249.460.000	

NO	PAGU RANHIR 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
49	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	DISKOMINFO	*Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah*	6 Aplikasi	368.491.000	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	DISKOMINFO	*Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah*	6 Aplikasi	368.491.000	
50	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	DISKOMINFO	*Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah*	1 Aplikasi	50.000.000	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	DISKOMINFO	*Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah*	1 Aplikasi	1.850.000.000	
51	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	DISKOMINFO	*Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas*	65 unit	105.500.000	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	DISKOMINFO	*Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas*	65 unit	105.500.000	
52	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	DISKOMINFO	*Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota*	62 Perangkat Daerah	4.020.000.000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	DISKOMINFO	*Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota*	62 Perangkat Daerah	4.020.000.000	
53	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	DISKOMINFO	*Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional*	2 Layanan	589.225.000	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	DISKOMINFO	*Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional*	2 Layanan	589.225.000	

NO	PAGU RANHIR 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	**LOKASI**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**LOKASI**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
54	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	DISKO MINFO	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo*	1 Dokumen	185.075.000	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	DISKO MINFO	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo*	1 Dokumen	185.075.000	
55	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	DISKO MINFO	*Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas*	1 Program	228.824.000	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	DISKO MINFO	*Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas*	1 Program	228.824.000	
56	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	DISKO MINFO	*Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan*	1 Aplikasi	180.000.000	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	DISKO MINFO	*Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan*	1 Aplikasi	180.000.000	
57	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	DISKO MINFO	*Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas*	65 Perangkat Daerah	2.283.704.292	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	DISKO MINFO	*Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas*	65 Perangkat Daerah	2.283.704.292	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	**DISKO MINFO**			**1.350.827.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**DISKO MINFO**			**2.310.462.000**	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**DISKO MINFO**	***Persentase ketersediaan data statistik yang memenuhi kaedah Satu Data***	**82%**	**1.350.827.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**DISKO MINFO**	***Persentase ketersediaan data statistik yang memenuhi kaedah Satu Data***	**82%**	**2.310.462.000**	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**DISKO MINFO**	***Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi kaidah standar data danmetadata***	**12944**	**1.350.827.000**	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**DISKO MINFO**	***Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi kaidah standar data danmetadata***	**12944**	**2.310.462.000**	

NO	PAGU RANHIR 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	**LOKASI**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**LOKASI**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
58	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	DISKOMINFO	*Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik*	130 Orang	493.172.400	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	DISKOMINFO	*Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik*	130 Orang	493.172.400	
59	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	DISKOMINFO	*Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan*	100 Persentase	17.610.000	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	DISKOMINFO	*Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan*	100 Persentase	17.610.000	
60	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	DISKOMINFO	*Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu*	100 Persentase	303.991.200	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	DISKOMINFO	*Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu*	100 Persentase	468.576.200	
61	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	DISKOMINFO	*Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata*	2 Dokumen	520.385.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	DISKOMINFO	*Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata*	2 Dokumen	1.315.435.000	
62	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	DISKOMINFO	*Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik*	1 Dokumen	15.668.400	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	DISKOMINFO	*Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik*	1 Dokumen	15.668.400	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	**DISKOMINFO**			**1.506.406.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**DISKOMINFO**			**1.506.406.000**	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**DISKOMINFO**	**Tingkat keamanan informasi pemerintah**	**50,08%**	**1.506.406.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**DISKOMINFO**	**Tingkat keamanan informasi pemerintah**	**50,08%**	**1.506.406.000**	

NO	PAGU RANHIR 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	**LOKASI**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**LOKASI**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**DISKOMINFO**	**Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan persandian**	**100%**	**1.506.406.000**	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**DISKOMINFO**	**Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan persandian**	**100%**	**1.506.406.000**	
63	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DISKOMINFO	*Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan*	1 Dokumen	284.055.000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DISKOMINFO	*Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan*	1 Dokumen	284.055.000	
64	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	DISKOMINFO	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik*	1 Laporan	892.176.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	DISKOMINFO	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik*	1 Laporan	892.176.000	
65	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DISKOMINFO	*Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi*	65 Perangkat Daerah	330.175.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DISKOMINFO	*Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi*	65 Perangkat Daerah	330.175.000	
					30.653.315.420					**35.867.835.420**	

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada pelaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan di 31 kecamatan wilayah Kabupaten Bandung, di mana dari hasil musyawarah tersebut, dengan mempertimbangkan perkiraan pagu anggaran dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan, tidak terdapat program/kegiatan dari masyarakat, yang dapat diakomodir oleh Diskominfo, dilihat dari kewenangan urusan yang ditangani oleh Diskominfo.

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025
Kabupaten Bandung

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat

3.1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional ini didasarkan pada RPJMN 2020-2025 yang telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dimana terdapat beberapa program prioritas yang berhubungan dengan kewenangan yang dilaksanakan oleh Diskominfo. Berkaitan dengan Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian, secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

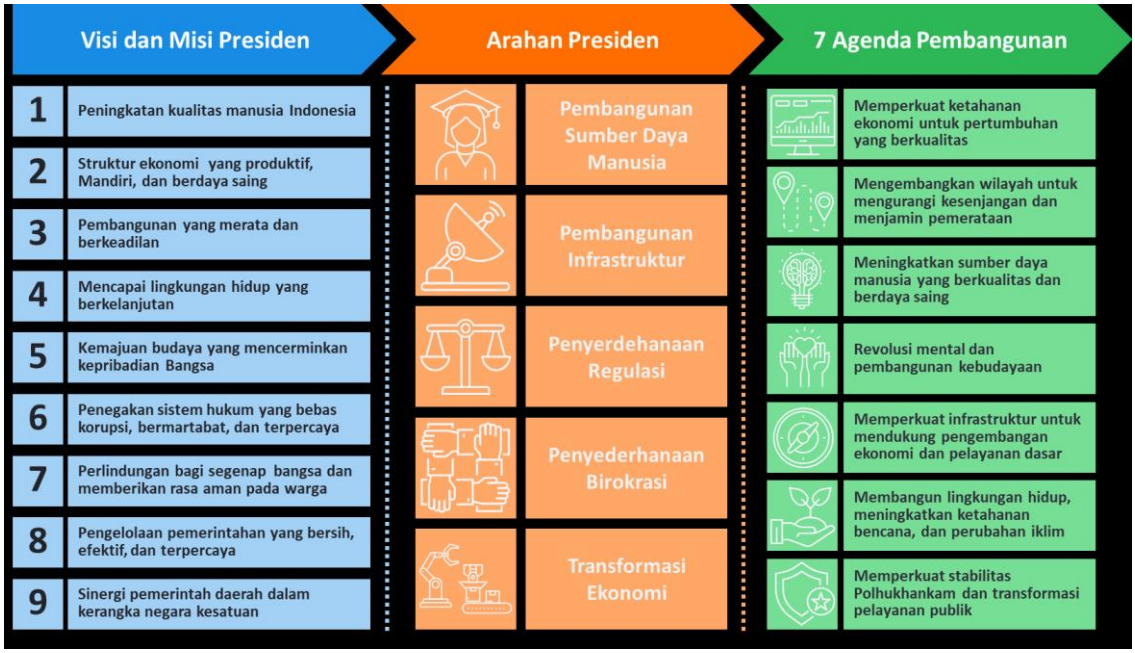
Urusan Komunikasi dan Informatika

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020—2025, disusun mengacu pada RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2025 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020. RPJMN Tahun 2020—2025, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan (Nawacita Kedua) Presiden dan wakil presiden periode 2020-2025.

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2020—2025, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2020—2025, yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran. Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan itu disusun untuk mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005—2025. Untuk itu, seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut. Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK. Institusi yang memiliki kewajiban dan kewenangan serta tanggung jawab mewujudkan masyarakat informasi yang berpengetahuan, inovatif, komunikatif, mandiri, sejahtera, berdaya saing global berkarakter Indonesia tidak hanya Kementerian

Komunikasi dan Informasi, tetapi juga pihak lain, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Seperti halnya visi, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, misi Menteri/Pimpinan Lembaga wajib mengacu pada misi Presiden dan Wakil Presiden. Berikut adalah penjabaran visi, misi Presiden dan 7 agenda pembangunan.

Gambar 3.1 Penjabaran Visi Misi Presiden



Sumber: Ringkasan Eksekutif RPJMN 2020-2025

Sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung pelaksanaan 9 misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, Kemenkominfo akan melaksanakan Misi
Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, 2, 3, 5, 8, dan 9 dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tujuan Kemenkominfo

Tujuan Kemenkominfo merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai di tahun 2025. Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2025 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik. Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

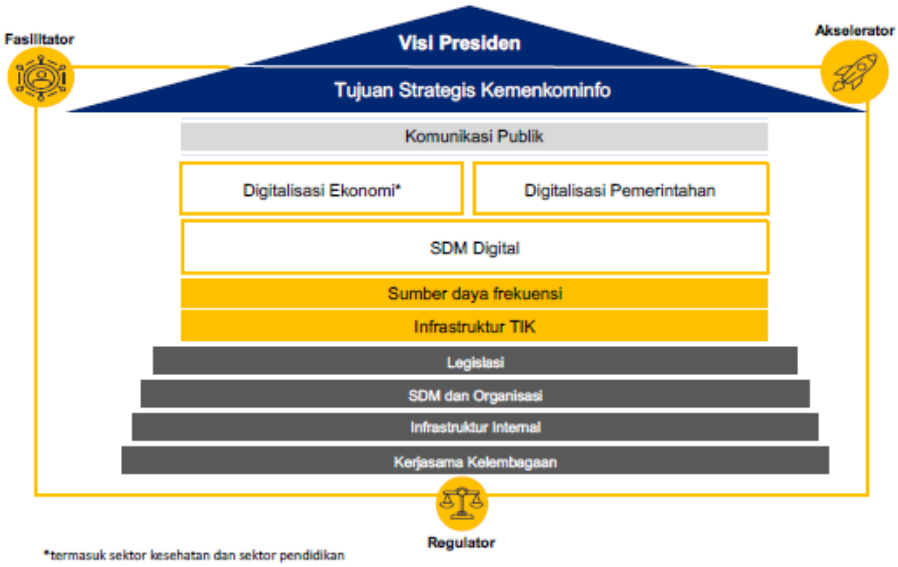
Sasaran Strategis Kemenkominfo

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2025 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas *Next Generation Broadband* Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mencapai sasaran strategis, Kemenkominfo mengoptimalkan fungsi-fungsi kementerian yang dapat digambarkan dalam kerangka sebagai berikut ini:

Gambar 3.2 Kerangka Renstra Kemenkominfo 2020—2025



Kerangka fungsi Kemenkominfo dalam pencapaian Renstra dirancang dengan filosofi satu kesatuan bangunan yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu yang pertama adalah atap sebagai tujuan dan sasaran, bagian kedua adalah pilar-pilar utama yang menjadi fokus utama dari tugas dan fungsi Kemenkominfo, serta bagian ketiga yaitu fondasi di lingkungan internal Kemenkominfo yang mendukung pencapaian dari tujuan dan sasaran. Ketiga bagian ini saling menyokong dan berkaitan satu dengan yang lainnya dan berjalan secara beriringan pada periode 2020-2025. Penjelasan rinci atas setiap bagian dari kerangka tujuan dan sasaran
strategis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Strategis Kemenkominfo sebagai penjabaran Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia dan Arah Pembangunan Nasional 2020 – 2025.
2. Pilar utama, yaitu enam pilar yang menjadi fungsi utama Kemenkominfo dalam mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan. Tiga pilar merupakan fondasi dalam mencapai tujuan nasional, dan tiga pilar lainnya merupakan proses transformasi digital. Keenam pilar tersebut merupakan fungsi utama bagi Kemenkominfo sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kemenkominfo. Pilar tersebut terdiri dari:

a. Infrastruktur TIK

   Pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses konektivitas.

b. Sumber Daya Frekuensi

   Pengelolaan sumber daya frekuensi serta peningkatan kualitas perangkat TIK.

c. SDM Digital

Pengembangan kompetensi SDM yang meliputi masyarakat umum dan ASN dalam mendukung ekonomi digital dan *e-government.*

d. Digitalisasi Ekonomi

   Pengembangan aspek ekonomi yang berbasiskan pada pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi digital.

e. Digitalisasi Pemerintahan

   Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

f. Komunikasi Publik

   Pelaksanaan informasi dan komunikasi publik melalui diseminasi informasi kebiijakan dan program prioritas pemerintah dan juga klarifikasi berita-berita hoaks, informasi menyesatkan dan narasi negatif yang *misleading*.

3. Fondasi yaitu fungsi pendukung yang diperlukan sebagai dasar agar pilar dapat dijalankan dengan baik, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Legislasi ke Depan

   Perkembangan teknologi di sektor komunikasi dan informatika di era revolusi industri 4.0 membutuhkan adaptasi yang cepat dan tepat. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Kemenkominfo harus mampu untuk melakukan analisis horizon teknologi dan regulasi ke depan sehingga diharapkan kerangka regulasi dan arah kebijakan yang dibuat dapat mengakomodir perkembangan teknologi agar tetap relevan untuk diterapkan di Indonesia dalam jangka waktu yang panjang.

b. Peningkatan Kualitas SDM dan Organisasi Kemenkominfo

   Fondasi pertama yang perlu diperkuat adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kemenkominfo untuk menyesuaikan dengan perkembangan digitalisasi di sektor TIK di Indonesia. Peran Kemenkominfo di era digitalisasi sangat krusial sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang unggul dan terdepan dalam penguasaan ilmuilmu terbaru di sektor TIK. Selain itu Kemenkominfo perlu memastikan bahwa seluruh tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Kemenkominfo memiliki penanggung jawab yang jelas.

c. Infrastruktur Internal Kemenkominfo

Kemenkominfo memiliki peran penting sebagai katalis untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan strategis untuk melakukan penghubungan sistem antar K/L/D/I nasional, sistem interoperabilitas dan lainnya. Selain itu, Kemenkominfo juga akan memperkuat infrastruktur fisik seperti peningkatan kapasitas dan kapabilitas untuk penelitian dan pengembangan, peningkatan kapabilitas pengujian perangkat TIK, penguatan kapabilitas infrastruktur komunikasi publik, serta infrastruktur fisik lainnya yang dibutuhkan.

d. Penguatan Kerjasama Kelembagaan

Memperkuat koordinasi dan kerjasama antar K/L/D serta kalangan industri untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan visi dan misi pembangunan pemerintah. Sinergi antar institusi juga dapat digunakan bagi Kemenkominfo untuk memperkuat kompetensi dan kurangnya sumber daya Kemenkominfo.

Urusan Statistik

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu, dalam rangka perwujudan Sistem Statistik Nasional, kerja sama dan koordinasi statistik antar instansi, lembaga/departemen, lembaga internasional, negara asing dan masyarakat luas perlu diwujudkan demi tercapainya koordinasi statistik nasional secara terpadu sebagai amanat dari Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997.

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden maka visi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020-2025 adalah “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”

("Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia"). Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju. Dengan visi baru ini, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik. Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang Ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), Ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan yang Ke-3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah

Rumusan Tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini.

Tabel 3.1 Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS 2020-2025

VISI BPS 2020-2024	Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju	**MISI BPS 2020-2024**
		1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
		2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
		3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
		4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah
TUJUAN	1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	

Sumber : RENSTRA, BPS 2020-2025

Rumusan Tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS pada tahun 2020-2025 adalah:

1. Tujuan 1: Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait dengan:
   Misi ke-1: Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
2. Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan:
   Misi ke-2: Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Tujuan 3: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan:
   Misi ke-3: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
4. Tujuan 4: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, terkait dengan:
   Misi ke-4: Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI BPS

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2020 – 2025) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2020 – 2025. Arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas pada tahun 2020-2025 sesuai dengan RPJMN mencakup:

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta;

Arah kebijakan yang dapat mendukung pencapaian tersebut yaitu terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Strategi yang dilakukan:

i. Meningkatkan harmonisasi kegiatan survei dan
ii. Mengurangi tumpang tindih kegiatan survei.

2. Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data;

Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

a. Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN;
b. Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional; dan
c. Pembinaan K/L/D/I dalam rangka penyediaan statistik sektoral.

Strategi yang dilakukan:

i. Meningkatkan komunikasi dengan responden;
ii. ii. Memperbaiki metode pengumpulan data;
iii. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang statistik;
iv. Membuat customer relationship management;
v. Menyusun data mining pengguna data;
vi. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data; dan
vii. Melakukan penyempurnaan pelayanan statsitik.

3. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM;

Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

a. Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
b. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS;
c. Membentuk organisasi yang lincah dan efisien.

Strategi yang dilakukan:

i. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS melalui penyelenggaraan *capacity building berdasar Training Need Analysis* (TNA), pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai dan
ii. Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional.

4. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;

Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

a. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima dan
b. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai.

Strategi yang dilakukan:

i. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS;
ii. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana kerja berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
iii. Menyusun standar sarana dan prasarana layanan statistik;
iv. Meningkatkan penerapan *smart office* pada satker berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; dan
v. Menyusun dokumen *grand design smart office* berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.

5. Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia;

Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia. Strategi yang dilakukan:

i. Meningkatkan penerapan standar penjaminan kualitas dalam kegiatan statistik dan
ii. Menyusun indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas

6. Peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas

Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu dengan melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral. Adapun penjaminan kualitas BPS mengacu pada rekomendasi UNSD (*United Nation Statistics Devision*) yang menurunkan 19 prinsip kualitas (*principle quality*) berdasarkan 10 UN *Fundamental Principle of Official Statistics*. Strategi yang dilakukan:

i. Menyusun *quality gates* dan melaksanakan penjaminan kualitas pada setiap proses bisnis statistik
ii. Melakukan pengukuran kualitas dan deklarasi kualitas pada output yang dihasilkan

Urusan Persandian

Visi BSSN Tahun 2020–2025 dengan mengacu pada visi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:
"Badan Siber dan Sandi Negara yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".
Visi BSSN digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran di BSSN dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ada. Melalui pelaksanaan arah organisasi BSSN, diharapkan akan membangkitkan dan mendorong seluruh entitas untuk bersinergi dalam mewujudkan tujuan sebagai institusi pemerintah yang memiliki daya kreativitas penuh inovatif, berpegang teguh pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabel serta diimbangi dengan nilai moral dan budaya kerja yang tinggi.

Misi BSSN Tahun 2020–2025 disusun dalam rangka memperjelas aspek-aspek penting yang perlu difokuskan dalam pencapaian visi BSSN. Misi BSSN Tahun 2020–2025 sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada pemerintah, sebagai bahan pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia.
   Misi nomor 1 (satu) di atas memiliki makna bahwa BSSN memberikan dukungan kepada pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia dalam upaya memajukan dan menyejahterakan bangsa melalui komponen teknologi, ekonomi, politik dan budaya di Indonesia.
2. Menyelenggarakan keamanan siber dan persandian secara efektif dan efisien.
   Misi nomor 2 (dua) memiliki makna bahwa BSSN menyelenggarakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan cara, menyusun dan

menerapkan kebijakan keamanan siber dan persandian nasional yang berkualitas, membangun sistem dan operasional keamanan siber dengan menggunakan standar-standar terkini yang meliputi identifikasi, deteksi, proteksi, mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan, dan pemulihan terhadap ancaman, insiden, dan/atau serangan siber dan sandi melalui koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan menjalin kerjasama internasional, berperan aktif dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia nasional di bidang keamanan siber dan sandi serta kompetensi pendukung yang diakui secara global, membangun kondisi yang aman di ruang siber, menjamin perangkat teknologi yang aman, membangun kesadaran pengguna terhadap keamanan siber serta mendorong pemanfaatan teknologi secara aman dan tidak melawan hukum untuk mewujudkan ekosistem siber yang aman dan nyaman.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya BSSN.

   Misi nomor 3 (tiga) memiliki makna bahwa penyelenggaraan keamanan siber dan persandian nasional perlu didukung sumber daya yang berkualitas dengan cara, melakukan inovasi secara terus menerus untuk meningkatkan pertumbuhan birokrasi organisasi, dan mendorong serta mengembangkan teknologi secara mandiri untuk mendukung pengembangan industri dalam negeri di bidang teknologi keamanan siber dan sandi, menyediakan sumber daya manusia, proses bisnis, sarana dan prasarana secara profesional dan akuntabel.

TUJUAN BSSN

Dalam rangka mencapai visi dan misi, BSSN berupaya memetakan visi dan misi tersebut dalam tujuan yang selanjutnya menjadi dasar dalam penetapan strategi BSSN pada periode tahun 2020–2025. Tujuan BSSN tahun 2020–2025 sebagai berikut:

1. Terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia.

   Keamanan siber saat ini telah menjadi isu prioritas seluruh negara di dunia semenjak TIK dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, hukum, organisasi, kesehatan, pendidikan, budaya, pemerintahan, keamanan, pertahanan, dan lain sebagainya. Langkah konkret yang diperlukan Indonesia saat ini dalam mengantisipasi perkembangan siber di dunia yang sangat cepat

yaitu melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menyinergikan dua aspek penting ranah siber yaitu ketahanan siber dan keamanan siber. Kedua aspek selanjutnya menjadi dasar dalam mewujudkan kedaulatan siber di Indonesia melalui proses peningkatan pertumbuhan kesadaran dan mengubah perilaku seluruh sektor dan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan dan keamanan siber di Indonesia.

Pencapaian tujuan "Terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia" ditandai dengan disusunnya Peta Jalan 2019-2045 "Mewujudkan Kedaulatan Siber Indonesia Berkelas Dunia", dimana periode pertama (2019-2025) merupakan fase stabilisasi. Fokus BSSN pada periode pertama peta jalan yaitu menjadi fondasi dan stabilisasi teknologi siber dan sandi nasional melalui strategi penguatan dasar-dasar agar BSSN berjalan secara stabil sebagai institusi negara di bidang siber. Tujuan Strategis ini memastikan bahwa melalui tugas dan fungsi yang dijalankan BSSN akan mengantarkannya menjadi institusi yang diakui dan menjadi referensi di tingkat internasional. Implementasi ukuran keberhasilan BSSN dalam mewujudkan tujuan strategis pada periode pertama peta jalan sesuai dokumen RPJMN 2020-2025 yaitu menjadi pemimpin dalam mencapai kegiatan prioritas penguatan ketahanan dan keamanan siber yang ditandai dengan meningkatnya skor GCI dari 0,792 (nol koma tujuh sembilan dua) pada tahun 2020 menjadi 0.838 (nol koma delapan tiga delapan) pada tahun 2025.

Pada era di mana implementasi teknologi seperti 5G, *massive computing, nano satelite, next gen-fiber optic,* dan lainnya yang saat ini sudah begitu masif menimbulkan berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu kedaulatan negara. Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi BSSN dalam merumuskan rencana aksi yang akan diimplementasikan pada periode Renstra 2020-2025. Lima aspek yang menjadi variabel pada perwujudan rencana aksi periode pertama meliputi teknologi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, organisasi, Kerjasama, dan regulasi.

2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BSSN.

Modal penting dalam keberhasilan suatu organisasi meliputi manusia, informasi, dan organisasi itu sendiri. Melalui Renstra BSSN, telah ditetapkan satu tujuan yang menggambarkan kekuatan organisasi berupa budaya kerja, dimana seluruh komponen fokus

pada pencapaian arah dan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Implementasi reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah aksi BSSN untuk mencapai pemerintahan yang baik dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Upaya pencapaian tujuan "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di BSSN" melalui peningkatan kualitas reformasi birokrasi di BSSN telah dimulai sejak tahun 2010 hingga saat ini dan telah diperoleh peningkatan indeks reformasi birokrasi dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta meningkatnya kematangan sistem pengawasan internal pemerintah BSSN. Berdasarkan capaian prestasi tersebut. BSSN melalui nilai reformasi birokrasi, BSSN terus berusaha melakukan perbaikan secara berkesinambungan dengan salah satunya berfokus dalam penyiapan pelaksanaan audit keamanan SPBE dalam mendorong terwujudnya perlindungan aset informasi sehingga akan mengefisiensikan birokrasi tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan publik pada implementasi SPBE. Implementasi ukuran keberhasilan BSSN dalam mewujudkan tujuan strategis "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di BSSN" ditandai dengan meningkatnya indeks reformasi birokrasi BSSN dari 70,01 ((tujuh puluh koma nol satu) pada tahun 2020 menjadi 84,36 (delapan puluh empat koma tiga puluh enam) pada tahun 2025.

SASARAN STRATEGIS BSSN

Dalam rangka mendukung pencapaian 2 (dua) tujuan sebagaimana disebutkan diatas, BSSN telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh BSSN dalam kurun waktu 2020-2025. Adapun Sasaran Strategis BSSN Tahun 2020-2025 sebagai berikut:

1. Meningkatnya maturitas keamanan siber di Indonesia.

   Isu keamanan siber menjadi hal penting yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Serangan siber di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berkembangnya teknologi internet menjadi latar belakang dalam peningkatan serangan siber di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Dihadapkan dengan kondisi di atas, setiap entitas pada semua sektor di Indonesia, diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dalam melakukan identifikasi risiko keamanan siber dan

melindungi seluruh aset yang dimiliki dari adanya ancaman/insiden siber sehingga akan terbentuk kematangan entitas dalam hal penanganan insiden siber secara sistematis dan terstruktur.

Pada era infrastruktur digital saat ini membuat Indonesia semakin rawan terhadap serangan siber. Transformasi digital yang makin pesat berpotensi meningkatkan serangan siber di Indonesia. Pengembangan sistem keamanan digital dapat dimulai dari memperbarui teknologi keamanan siber untuk mengakomodasi ancaman siber baru pada semua lini kehidupan berbasis digital. Melalui konsep maturitas penanganan insiden siber secara mandiri oleh semua sektor baik pemerintah, IIKN, dan ekonomi digital, akan membentuk sebuah ekosistem siber yang terintegrasi, efektif, dan solid di wilayah Indonesia.

2. Terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima.

   Dengan merujuk pada penilaian GCI yang telah diakui dan menjadi salah satu rujukan bagi seluruh negara terkait komitmen dan usaha dalam menjaga dan meningkatkan keamanan siber, Indonesia membutuhkan sebuah strategi keamanan siber nasional dengan tujuan untuk membangun dan menerapkan tata kelola keamanan siber yang efektif, membangun kemandirian teknologi keamanan siber, mencegah dan mengelola ancaman, insiden serangan siber, meningkatkan budaya keamanan dalam ruang siber, serta mengoptimalkan sumber daya keamanan siber. Keberhasilan dalam penyusunan dan implementasi strategi keamanan siber nasional tidak terlepas dari koordinasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan keamanan siber nasional. Melalui peran aktif seluruh komponen bangsa akan mewujudkan tatanan penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima di Indonesia.

3. Terwujudnya birokrasi BSSN yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik.

   Pembaharuan tatanan birokrasi di BSSN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif serta efisien dalam rangka menuju pemerintahan yang dinamis dimulai melalui penerapan budaya birokrasi dalam menerjemahkan permasalahan dan kendala yang ada pada periode sebelumnya menjadi representasi pembelajaran bersama secara adaptif dalam mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia.

Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN Tahun 2020-2025 Bidang Keamanan Siber

Dalam agenda pembangunan penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan Tahun 2020-2025 diarahkan pada pemantapan stabilitas keamanan nasional untuk mewujudkan rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat, serta keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional.

Arah kebijakan dan strategi nasional untuk mengatasi isu-isu strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di ruang siber adalah penguatan keamanan dan ketahanan siber yang diwujudkan dengan strategi berikut:

1. penguatan pengamanan infrastruktur siber
2. pembangunan dan penguatan *computer emergency response team.*
3. pencegahan kejahatan siber dan peningkatan kerjasama internasional bidang siber.
4. penguatan kapasitas sumber daya manusia keamanan siber.
5. penyelesaian kejahatan siber *clearance rate* tindak pidana siber.

Arah kebijakan di atas diperkuat dengan adanya proyek prioritas strategis penguatan ketahanan dan keamanan siber. Proyek prioritas strategis ini dimaksudkan sebagai penajaman proyek-proyek prioritas yang dianggap memiliki nilai strategis dan daya ungkit dalam mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional di bidang keamanan nasional. Selain itu, dalam RPJMN Tahun 2020-2025 BSSN juga terlibat dalam manajemen keamanan informasi SPBE.

3.1.2. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Jawa Barat

Telaahan terhadap kebijakan Provinsi Jawa Barat, mengacu pada Indikator Kinerja Program RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023. Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat adalah Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, meliputi komunikasi, informatika, persandian dan statistik sektoral berdasarkan asas otonomi, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

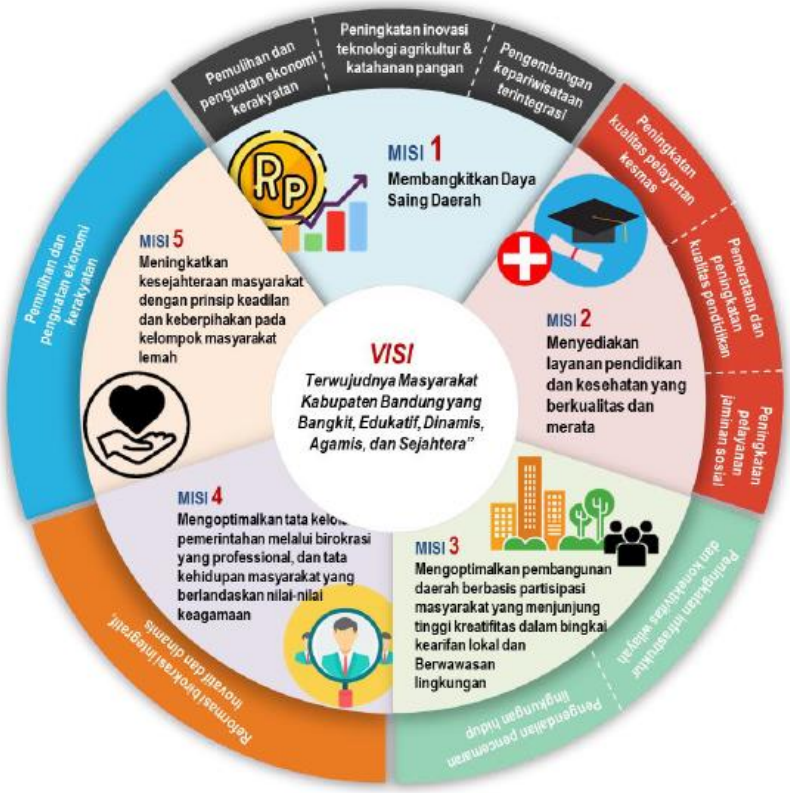
perundangan. Dengan semangat itu, maka Diskominfo Provinsi Jawa Barat untuk periode waktu 2018-2023 akan mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu ***"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi"***. Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan berlandaskan pada akhlak mulia.

Berkaitan dengan pelaksanaan visi tersebut perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian misi Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Diskominfo Provinsi Jawa Barat. Untuk mendukung misi kepala daerah selama periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Membentuk Manusia Pancasila yang Bertakwa;
2. Melahirkan manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif;
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan;
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat Yang Sejahtera dan Adil;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan pada telaahan urusan yang dilaksanakan oleh DISKOMINFO yang dilakukan dari level nasional dan provinsi, maka beberapa kebijakan strategis, program dan kegiatan tersebut diturunken ke level Kabupaten. Dimana kebijakan TIK di Kabupaten Bandung tentunya tidak terlepas dari visi misi yang sudah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bandung terpilih. Adapun Visi pemerintah Kabupaten Bandung 2021-2026 ialah: **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera".Adapun turunanya terdiri dari 5 misi yang dapat digambarkan pada gambar 3.5 sebagai berikut:**



Gambar 3.3 Visi dan Misi Kabupaten Bandung
(Sumber : BAPPELITBANGDA, Kab. Bandung)

Berdasarkan Gambar 3.3 DISKOMINFO masuk dalam Misi Nomor 3 Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan dan 4 yaitu: Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Diskominfo Tahun Anggaran 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				**30.653.315.420**	**APBD**			**28.094.543.766**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**30.653.315.420**	**APBD**			**28.094.543.766**
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**27.796.082.420**	**APBD**			**25.237.310.766**
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai AKIP***	DISKOMINFO	**74**	**15.863.785.310**	**APBD**		**74**	**14.805.013.656**
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Tersedianya Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang diselesaikan tepat waktu***	DISKOMINFO	**100%**	**107.099.000**	**APBD**		**100%**	**107.099.000**
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	DISKOMINFO	2 Dokumen	11.319.000	**APBD**		2 Dokumen	11.319.000
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	DISKOMINFO	1 Dokumen	3.250.000	**APBD**		1 Dokumen	3.250.000
2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	DISKOMINFO	1 Dokumen	3.250.000	**APBD**		1 Dokumen	3.250.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	DISKOMINFO	1 Dokumen	4.000.000	**APBD**		1 Dokumen	4.000.000
2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	DISKOMINFO	1 Dokumen	4.000.000	**APBD**		1 Dokumen	4.000.000
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	DISKOMINFO	3 Laporan	6.680.000	**APBD**		3 Laporan	6.680.000
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	DISKOMINFO	1 Laporan	2.000.000	**APBD**		1 Laporan	2.000.000
2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah*	DISKOMINFO	1 Dokumen	72.600.000	**APBD**		1 Dokumen	72.600.000
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan***	DISKOMINFO	**100%**	**12.942.739.420**	**APBD**		**100%**	**11.883.967.766**
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	DISKOMINFO	57 Orang/bulan	12.914.989.420	**APBD**		57 Orang/bulan	11.856.217.766

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD*	DISKOMINFO	12 Dokumen	6.250.000	**APBD**		12 Dokumen	6.250.000
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	DISKOMINFO	1 Laporan	10.750.000	**APBD**		1 Laporan	10.750.000
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	DISKOMINFO	12 Laporan	10.750.000	**APBD**		12 Laporan	10.750.000
2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu***	DISKOMINFO	**100%**	**99.900.000**	**APBD**		**100%**	**99.900.000**
2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	DISKOMINFO	1 Paket	20.000.000	**APBD**		1 Paket	20.000.000
2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	DISKOMINFO	4 Dokumen	10.000.000	**APBD**		4 Dokumen	10.000.000
2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	DISKOMINFO	1 Orang	11.960.000	**APBD**		1 Orang	11.960.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	DISKOMINFO	57 Orang	57.940.000	**APBD**		57 Orang	57.940.000
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Tersedianya Persentase ketersediaan operasional perkantoran***	DISKOMINFO	**100%**	**179.500.000**	**APBD**		**100%**	**179.500.000**
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	DISKOMINFO	1 Paket	10.000.000	**APBD**		1 Paket	10.000.000
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	DISKOMINFO	2 Paket	10.000.000	**APBD**		2 Paket	10.000.000
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	DISKOMINFO	1 Paket	10.000.000	**APBD**		1 Paket	10.000.000
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	DISKOMINFO	1 Paket	10.000.000	**APBD**		1 Paket	10.000.000
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	DISKOMINFO	1 Dokumen	10.000.000	**APBD**		1 Dokumen	10.000.000
2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	DISKOMINFO	1 Paket	10.000.000	**APBD**		1 Paket	10.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	DISKOMINFO	12 Laporan	19.500.000	**APBD**		12 Laporan	19.500.000
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	DISKOMINFO	12 Laporan	100.000.000	**APBD**		12 Laporan	100.000.000
2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Tersedianya Persentase ketersediaan operasional perkantoran***	DISKOMINFO	**100%**	**465.331.890**	**APBD**		**100%**	**465.331.890**
2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	DISKOMINFO	1 Unit	167.931.890	**APBD**		1 Unit	167.931.890
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	DISKOMINFO	1 Unit	200.000.000	**APBD**		1 Unit	200.000.000
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	DISKOMINFO	20 Unit	97.400.000	**APBD**		20 Unit	97.400.000
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Tersedianya Persentase ketersediaan operasional perkantoran***	DISKOMINFO	**100%**	**1.533.098.000**	**APBD**		**100%**	**1.533.098.000**
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	DISKOMINFO	1 Laporan	2.560.000	**APBD**		1 Laporan	2.560.000
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	DISKOMINFO	2 Laporan	530.000.000	**APBD**		2 Laporan	530.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	DISKOMINFO	10 Laporan	1.000.538.000	**APBD**		10 Laporan	1.000.538.000
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Tersedianya Persentase ketersediaan operasional perkantoran***	DISKOMINFO	**100%**	**536.117.000**	**APBD**		**100%**	**536.117.000**
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	DISKOMINFO	1 Unit	32.000.000	**APBD**		1 Unit	32.000.000
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	DISKOMINFO	15 Unit	269.109.000	**APBD**		15 Unit	269.109.000
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	DISKOMINFO	5 Unit	35.008.000	**APBD**		5 Unit	35.008.000
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	DISKOMINFO	1 Unit	200.000.000	**APBD**		1 Unit	200.000.000
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	DISKOMINFO	**100%**	**3.227.962.818**	**APBD**		**100%**	**3.227.962.818**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Indeks Presepsi Publik terhadap penyediaan informasi pemerintahan daerah**	DISKOMINFO	**81**	**3.227.962.818**	**APBD**		**81**	**3.227.962.818**
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	*Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media*	DISKOMINFO	1 Laporan	149.640.000	**APBD**		1 Laporan	149.640.000
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	*Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo*	DISKOMINFO	1 Komunitas	37.738.000	**APBD**		1 Komunitas	37.738.000
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	*Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan*	DISKOMINFO	1 Permohonan	186.794.000	**APBD**		1 Permohonan	186.794.000
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	*Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah*	DISKOMINFO	1 Rekomendasi	66.650.000	**APBD**		1 Rekomendasi	66.650.000
2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	*Persentase khalayak yang terpapar informasi publik*	DISKOMINFO	100 Persentase	1.529.901.318	**APBD**		100 Persentase	1.529.901.318

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/ juknis*	DISKOMINFO	5 Media	518.000.000	**APBD**		5 Media	518.000.000
2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	*Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun*	DISKOMINFO	1 Dokumen	25.000.000	**APBD**		1 Dokumen	25.000.000
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	*Jumlah Konten Informasi Publik*	DISKOMINFO	129 Konten	645.681.500	**APBD**		129 Konten	645.681.500
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	*Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/ pelatihan*	DISKOMINFO	65 Orang	68.558.000	**APBD**		65 Orang	68.558.000
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	***- Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi*** ***- Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Perangkat Daerah yang terhubung dengan Akses Internet***	DISKOMINFO	**- 68,75** **- 22**	**8.704.334.292**	**APBD**		**- 68,75** **- 22**	**7.204.334.292**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase perangkat daerah mendapatkan layanan jaringan komunikasi data yang memadai***	DISKOMINFO	**100%**	**194.055.000**	**APBD**		**100%**	**194.055.000**
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa*	DISKOMINFO	1 Dokumen	194.055.000	**APBD**		1 Dokumen	194.055.000
2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Aplikasi penunjang e-government terbangun dan terpelihara**	DISKOMINFO	**7 Aplikasi**	**8.510.279.292**	**APBD**		**7 Aplikasi**	**7.010.279.292**
2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	*Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional*	DISKOMINFO	2 Aplikasi	100.000.000	**APBD**		2 Aplikasi	100.000.000
2.16.03.2.02.0014	Koordinasi penyusunan proses bisnis	*Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo*	DISKOMINFO	1 Dokumen	50.000.000	**APBD**		1 Dokumen	50.000.000
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	*Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda*	DISKOMINFO	2 Laporan	100.000.000	**APBD**		2 Laporan	100.000.000
2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	*Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan*	DISKOMINFO	1 Dokumen	249.460.000	**APBD**		1 Dokumen	249.460.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	*Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah*	DISKOMINFO	6 Aplikasi	368.491.000	**APBD**		6 Aplikasi	368.491.000
2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	*Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah*	DISKOMINFO	1 Aplikasi	50.000.000	**APBD**		1 Aplikasi	50.000.000
2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	*Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas*	DISKOMINFO	65 unit	105.500.000	**APBD**		65 unit	105.500.000
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	*Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota*	DISKOMINFO	31 Perangkat Daerah	4.020.000.000	**APBD**		31 Perangkat Daerah	2.520.000.000
2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	*Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional*	DISKOMINFO	2 Layanan	589.225.000	**APBD**		2 Layanan	589.225.000
2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit*	DISKOMINFO	1 Dokumen	185.075.000	**APBD**		1 Dokumen	185.075.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo							
2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	*Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas*	DISKOMINFO	1 Program	228.824.000	**APBD**		1 Program	228.824.000
2.16.03.2.02.0029	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	*Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan*	DISKOMINFO	1 Aplikasi	180.000.000	**APBD**		1 Aplikasi	180.000.000
2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	*Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas*	DISKOMINFO	65 Perangkat Daerah	2.283.704.292	**APBD**		65 Perangkat Daerah	2.283.704.292
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**1.350.827.000**	**APBD**			**1.350.827.000**
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	***Persentase ketersediaan data statistik yang memenuhi kaedah Satu Data***	DISKOMINFO	**82%**	**1.350.827.000**	**APBD**		**82%**	**1.350.827.000**
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi kaidah standar data danmetadata***	DISKOMINFO	**10595**	**1.350.827.000**	**APBD**		**10595**	**1.350.827.000**
2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	*Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik*	DISKOMINFO	130 Orang	384.624.000	**APBD**		130 Orang	384.624.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	*Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan*	DISKOMINFO	100 Persentase	26.523.000	**APBD**		100 Persentase	26.523.000
2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	*Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu*	DISKOMINFO	100 Persentase	460.710.000	**APBD**		100 Persentase	460.710.000
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	*Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata*	DISKOMINFO	2 Dokumen	434.570.000	**APBD**		2 Dokumen	434.570.000
2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	*Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik*	DISKOMINFO	1 Dokumen	44.400.000	**APBD**		1 Dokumen	44.400.000
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**1.506.406.000**	**APBD**			**1.506.406.000**
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Tingkat keamanan informasi pemerintah**	DISKOMINFO	**50,08%**	**1.506.406.000**	**APBD**		**50,08%**	**1.506.406.000**
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan persandian**	DISKOMINFO	**100%**	**1.506.406.000**	**APBD**		**100%**	**1.506.406.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan*	DISKOMINFO	1 Dokumen	284.055.000	**APBD**		1 Dokumen	284.055.000
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik*	DISKOMINFO	1 Laporan	892.176.000	**APBD**		1 Laporan	892.176.000
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi*	DISKOMINFO	65 Perangkat Daerah	330.175.000	**APBD**		65 Perangkat Daerah	330.175.000
J U M L A H					**30.653.315.420**	**APBD**			**28.094.543.766**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung pada tahun 2025 dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran, menyusun suatu instrumen pelaksanaan teknis dalam bentuk program dan kegiatan. Sebagai salah satu instrumen, program akan mencakup satu atau beberapa kegiatan. Adapun kegiatan, sebagai turunan dari program, akan mencakup tindakan-tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia maupun barang modal termasuk didalamnya peralatan dan teknologi sebagai input untuk menghasilkan output kegiatan yang telah ditargetkan. Adapun rencana kerja dan pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rekapitulasi program dan kegiatan Diskominfo Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			**30.653.315.420**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**30.653.315.420**
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**27.796.082.420**
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai AKIP***	**74**	**15.863.785.310**
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Tersedianya Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang diselesaikan tepat waktu***	**100%**	**107.099.000**
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	11.319.000
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	3.250.000
2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	3.250.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	4.000.000
2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	4.000.000
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	3 Laporan	6.680.000
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	1 Laporan	2.000.000
2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah*	1 Dokumen	72.600.000
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan***	**100%**	**12.942.739.420**
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	57 Orang/bulan	12.914.989.420
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD*	12 Dokumen	6.250.000
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	10.750.000
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	12 Laporan	10.750.000
2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu***	**100%**	**99.900.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	1 Paket	20.000.000
2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	4 Dokumen	10.000.000
2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	1 Orang	11.960.000
2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	57 Orang	57.940.000
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Tersedianya Persentase ketersediaan operasional perkantoran***	**100%**	**179.500.000**
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	10.000.000
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	2 Paket	10.000.000
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	10.000.000
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	10.000.000
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	1 Dokumen	10.000.000
2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	1 Paket	10.000.000
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	19.500.000
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	100.000.000
2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Tersedianya Persentase ketersediaan operasional perkantoran***	**100%**	**465.331.890**
2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	1 Unit	167.931.890
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	1 Unit	200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	20 Unit	97.400.000
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Tersedianya Persentase ketersediaan operasional perkantoran***	**100%**	**1.533.098.000**
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	2.560.000
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	2 Laporan	530.000.000
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	10 Laporan	1.000.538.000
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Tersedianya Persentase ketersediaan operasional perkantoran***	**100%**	**536.117.000**
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	32.000.000
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	15 Unit	269.109.000
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	5 Unit	35.008.000
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	200.000.000
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**100%**	**3.227.962.818**
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Indeks Presepsi Publik terhadap penyediaan informasi pemerintahan daerah**	**81**	**3.227.962.818**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	*Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media*	1 Laporan	149.640.000
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	*Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo*	1 Komunitas	37.738.000
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	*Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan*	1 Permohonan	186.794.000
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	*Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah*	1 Rekomendasi	66.650.000
2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	*Persentase khalayak yang terpapar informasi publik*	100 Persentase	1.529.901.318
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis*	5 Media	518.000.000
2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	*Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun*	1 Dokumen	25.000.000
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	*Jumlah Konten Informasi Publik*	129 Konten	645.681.500
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	*Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan*	65 Orang	68.558.000
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**- *Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi*** **- *Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Perangkat Daerah yang terhubung dengan Akses Internet***	**- 68,75** **- 22**	**8.704.334.292**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase perangkat daerah mendapatkan layanan jaringan komunikasi data yang memadai***	**100%**	**194.055.000**
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa*	1 Dokumen	194.055.000
2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Aplikasi penunjang e-government terbangun dan terpelihara**	**7 Aplikasi**	**8.510.279.292**
2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	*Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional*	2 Aplikasi	100.000.000
2.16.03.2.02.0014	Koordinasi penyusunan proses bisnis	*Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo*	1 Dokumen	50.000.000
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	*Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda*	2 Laporan	100.000.000
2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	*Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan*	1 Dokumen	249.460.000
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	*Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah*	6 Aplikasi	368.491.000
2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	*Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah*	1 Aplikasi	50.000.000
2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	*Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas*	65 unit	105.500.000
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	*Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota*	31 Perangkat Daerah	4.020.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	*Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional*	2 Layanan	589.225.000
2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo*	1 Dokumen	185.075.000
2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	*Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas*	1 Program	228.824.000
2.16.03.2.02.0029	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	*Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan*	1 Aplikasi	180.000.000
2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	*Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas*	65 Perangkat Daerah	2.283.704.292
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			**1.350.827.000**
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	***Persentase ketersediaan data statistik yang memenuhi kaedah Satu Data***	**82%**	**1.350.827.000**
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi kaidah standar data danmetadata***	**10595**	**1.350.827.000**
2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	*Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik*	130 Orang	384.624.000
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	*Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan*	100 Persentase	26.523.000
2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	*Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu*	100 Persentase	460.710.000
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	*Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata*	2 Dokumen	434.570.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	*Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik*	1 Dokumen	44.400.000
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**1.506.406.000**
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Tingkat keamanan informasi pemerintah**	**50,08%**	**1.506.406.000**
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan persandian**	**100%**	**1.506.406.000**
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan*	1 Dokumen	284.055.000
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik*	1 Laporan	892.176.000
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi*	65 Perangkat Daerah	330.175.000
J U M L A H				**28.094.543.766**

BAB V
P E N U T U P

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) ini juga diharapkan menjadi dokumen panduan dalam proses monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025. Rancangan RENJA DISKOMINFO 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk proses pembangunan 5 tahunan yang telah dibuat. Adapun program dan kegiatannya tentunya sangat berkaitan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dokumen Ranhir Renja DISKOMINFO 2025 ini tentunya bukan suatu dokumen yang kaku sehingga jika terjadi dinamika lapangan yang penting dan mengharuskan koreksi pada dokumen yang telah dibuat maka dapat dilakukan dimasa yang akan datang. Perubahan yang terjadi pun pada dokumen ini memperhatikan proses atau penjadwalan pembangunan yang ada di Kabupaten Bandung.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

ttd

YOSEP NUGRAHA

BUPATI BANDUNG

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Bandung

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	v			
2.	Pengolahan data dan informasi.	v			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah.	v			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.	v			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	v			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD.	v			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	v			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.		v		
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	v			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah.	v			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.		v		
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	v			
10 .c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	v			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah sesuai surat edaran Bupati.	v			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	v			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah.	v			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	v			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.	v			

Soreang,

KEPALA

PEMERINTAH KABUPATEN DISKOMINFO BANDUNG

H. YOSEP NUGRAHA, S.H.,M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19730628 199202 1 001